

STRATEGI DINAS PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA UTARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Carlos A. Sombang¹
Sarah Sambiran²
Ismail Rachman³

Abstrak

Kabupaten Minahasa utara merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara bahkan pariwisata yang ada di minahasa utara cukup dikenal masyarakat yang ada seperti yang biasa di kunjungi adalah wisata alam, agrowisata, wisata seni dan budaya, dan wisata peninggalan sejarah, melihat begitu banyaknya potensi wisata yang ada, maka sangat wajarlah sektor pariwisata ini ditetapkan sebagai andalan dalam mengembangkan daerah tujuan wisata di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat mengeksplorasi masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam usaha untuk memajukan pariwisata maka promosi wisata adalah salah satu alternatifnya tetapi dalam kenyataannya promosi kepariwisatawan yang dilakukan dinas pariwisata belum berjalan dengan efektif, karena hanya melalui sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet ataupun yang lainnya yang hal demikian belum tentu menjangkau para wisatawan mancanegara maka dari pada itu diharapkan website yang dikelola dians pariwisata harus tersedia promosi juga tentu untuk menyentuh para wisatawan yang ada dari mancanegara.

Kata Kunci : Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pariwisata.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Dinas pariwisata memiliki fungsi sebagai pengatur, pengelola obyek-obyek wisata yang ada di kabupaten minahasa utara, agar supaya obyek wisata yang ada bisa menjadi unggulan yang banyak diminati masyarakat luas bukan cuma masyarakat minahasa utara tetapi juga masyarakat mancanegara dan domestic juga. seiring dengan pengelolaan yang baik dan berkesinambungan oleh instansi pemerintah terkhusus dinas pariwisata maka akan menguntungkan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten minahasa utara.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengatur sumber-sumber pendapatan daerah seperti :

- a. Hasil pajak
- b. Hasil retribusi
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Hal tersebut merupakan tolak ukur yang terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. disisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan yang dapat dijadikan patokan untuk melihat sejauh mana daerah mampu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di daerah untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan

pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah.

Disamping itu peluang untuk melibatkan masyarakat local dalam proses pengembangan pariwisata menjadi lebih terbuka. daripada menunggu proses pengambilan keputusan yang sering memakan waktu yang sangat lama. pemerintah daerah dapat mengambil keputusan sendiri untuk memilih dan melaksanakan proyek-proyek kepariwisataan, semua ini sebenarnya merupakan modal besar untuk mempercepat proses pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan di berbagai daerah,

Pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah, berkaitan dengan pendapatan asli daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa, pemerintah menyadari bahwa sector pariwisata bukanlah merupakan sector penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dan berpeluang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Padahal Kabupaten Minahasa Utara memiliki banyak sekali tempat wisata yang tidak kalah dengan daerah yang lain, akan tetapi mengapa objek wisata yang ada di kabupaten minahasa utara masih kurang diminati pada hal jika melihat secara strategis tempat wisata yang ada di kabupaten minahasa utara sangat dekat dengan pusat kota di tambah lagi dekat dengan bandara utama yang ada di Sulawesi utara.

Memang masih banyak hal yang harus di perbaiki seperti sarana prasarana yang ada tetapi hal yang tak kalah penting adalah seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat dalam hal ini dinas pariwisata, supaya setelah objek wisata yang ada terbuka

bukan Cuma mendapatkan pendapatan asli daerah tetapi juga masyarakat yang ada di sekitar diuntungkan.

Selain itu juga dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector pariwisata masih banyak yang seharusnya jadi pekerjaan dari dinas pariwisata misalnya setiap hotel dan penginapan harus diperbaiki agar kiranya setiap pengunjung yang datang mereka merasa puas dengan tempat yang akan mereka inapi, ini merupakan sebuah strategi yang baik untuk menggaet para turis dari mancanegara yang tak pernah ragu membayar lebih karena mereka merasa puas, bukan Cuma karena objek wisatanya baik tetapi karena fasilitas yang di sediakan sangat memumpuni, hal ini bisa tercapai apabila pemerintah setempat dalam hal ini dinas pariwisata mampu bekerja sama dengan berbagai lintas sector yang ada supaya menghasilkan kualitas wisata yang baik, disatu sisi yang lain pemerintah yang ada dituntut supaya bisa juga membuka objek wisata yang baru supaya semakin banyak objek wisata yang ada maka pendapatan di daerah itu makin banyak dalam hal ini kabupaten minahasa utara.

Hal yang tak kalah penting dari itu adalah pemerintah seharusnya mampu mempekerjakan masyarakat daerah disektor wisata, kenapa harus begitu karena misalnya ditempat wisata sejara otomatis yang lebih tau sejara itu adalah masyarakat daerah dan juga wisata tarian otomatis masyarakat yang tinggal di daerah tersebut lebih memahami seni tari itu, ini merupakan salah satu strategi yang baik juga untuk menarik para pengunjung wisata dan juga di tuntut disini adalah agar sekiranya juga setiap tempat wisata yang ada mampu di jangkau oleh siapapun karena kita tak bisa menutup mata ada tempat wisata lain yang di kuasai oleh pihak pihak

tertentu yang pada akhirnya sebagian dari wisatawan sulit mengunjungi tempat itu. Maka dari itu di tuntut disini adalah bagaimana strategi pemerintah daerah kabupaten minahasa utara dalam hal ini dinas pariwisata untuk bisa membuat semacam cara cara supaya objek wisata yang ada di kabupaten minahasa utara bisa membirakan subangsi bagi kabupaten, karena yang di khawatirkan disini adalah dinas pariwisata yang cuma membiarkan objek wisata yang ada dan tak mengolahnya, padahal alam yang tersedia sudah sangat baik dan memumpuni untuk di kelola. Karena itu permasalahan di atas dapat diatasi apabila dilakukan dengan usaha pengembangan yang terencana oleh semua instansi yang terkait khususnya dinas pariwisata minahasa utara.

Padahal dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata di sebutkan bahwa pariwisata sebagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. namun demikian ternyata sector pariwisata di kabupaten minahasa utara belum optimal, terbukti masih rendahnya kontribusi sector pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten minahasa utara.

Oleh karena itu dapat diuraikan berbagai masalah yang ada sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia di objek wisata
2. Hambatan dalam akses angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk mencapai objek wisata
3. Kualitas pelayanan yang belum optimal kepada pengunjung objek wisata
4. Informasi tentang objek wisata di kabupaten minahasa utara belum

sepenuhnya dengan mudah dapat diperoleh dari berbagai sumber

Berdasarkan fenomena tersebut maka di perlukan sebuah strategi yang tepat guna mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan pariwisata..

Tujuan Pustaka

Menurut Gerry dan Kevan scholes dalam bukunya yang berjudul "Exploring corporate Strategy" (2005:8) mendefinisikan strategi sebagai arah dan cakupan yang cukup panjang dalam organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategis menjadi bidang ilmu yang berkembang dengan cepat, muncul sebagai respon atas meningkatnya pergolakan lingkungan dan akibat kompleksnya dinamika lingkungan organisasi. Bidang ilmu ini melihat pengelolaan organisasi secara menyeluruh dan berusaha menjawab tantangan perubahan lingkungan. Ciri khusus manajemen strategis adalah penekanan pada pengambilan keputusan strategis, keputusan strategis berhubungan dengan masa yang akan datang dalam jangka panjang untuk organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten minahasa utara melalui pengembangan pariwisata maka di perlukan konsep manajemen strategis.

Manajemen strategi adalah suatu cara pengelolaan organisasi atau program yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan lingkungan internal dari organisasi atau program tersebut, dalam

manajemen strategis terdapat dua bagian yang saling berhubungan yaitu perencanaan strategis dan pelaksanaan pengelolaan dari hasil perencanaan strategi tersebut (Triton PB 2007:35). Sedangkan menurut Hunger David dan Thomas L (2003:4) manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang yang meliputi :

1. Perumusan strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan acuan lingkungan dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi meliputi misi organisasi, tujuan-tujuan yang ingin di capai pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan

2. Implementasi strategi

Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui perubahan secara menyeluruh, struktur atau system manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Kecuali ketika di perlukan perubahan secara drastic pada organisasi manajer level menengah dan bahwa akan mengimplementasi strateginya secara kusus dengan pertimbangan dari pemerintah kadang-kadang di rujuk sebagai perencanaan operasional implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya.

Strategi adalah sebuah kosa kata yang pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu 'strategos' yang berarti militer dan 'ag' yang artinya memimpin. (Pornomo, 2005 :8 dalam buku Triton PB, 2007:23). Berdasarkan pemaknaan ini maka kata strategi pada awalnya bukan kosa kata disiplin ilmu manajemen, namun lebih dekat dengan

bidang kemiliteran. dan dalam kamus besar bahasa Indonesia strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Strategi adalah sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komperatif, dan sinergis yang ideal berkelanjutan sebagai arah, cakupan dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi. Secara kusus strategi adalah penempatan misi organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan esternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. George A. Ateiner.

Berdasarkan definisi di atas maka strategi organisasi adalah suatu kebijakan dasar organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Peranan yang di mainkan oleh strategi tersebut adalah sebagai penentu arah yang harus di tempu oleh organisasi yang bersangkutan. Selain itu strategi juga dapat di soroti sekurang-kurangnya dari dua perspektif yang berbeda yaitu :

1. Mengenai apa yang hendak di lakukan organisasi, di sini strategi di definisikan sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misi organisasi.
2. Mengenai masalah apa sesungguhnya yang di lakukan oleh sebuah organisasi, maksudnya bahwa strategi merupakan tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Tahapan dalam penyusunan strategi terdiri dari enam tahapan

1. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan
2. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis
3. Menyusun perencanaan tindakan (action plan)
4. Menyusun rencana pemberdayaan
5. Mempertimbangkan keunggulan
6. Mempertimbangkan keberlanjutan

Dengan memahami tahapan umum yang ada dalam penyusunan strategi, maka akan lebih mudah di dalam melakukan strategi itu sendiri.

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. seorang wisatawan atau turis adalah seorang yang melakukan perjalanan dari rumahnya menuju tempat rekreasi ini merupakan definisi oleh organisasi pariwisata dunia.

Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. mereka menangani jasa melalui dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan dan lain-lain. dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya. Banyak Negara bergantung dari industri oleh karena itu setiap kepala Negara menghimbau bagi setipa kepala daerah supaya bisa membuat strategi yang dalam pegembangan objek wisata bahkan lebih memperkenalkan lagi.

Oleh karena itu pengembangan industri ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organinsasi untuk memperkenalkan wilayah-wilaya yang tentu daerah wisata mereka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. oleh karena itu harus

memperhatikan 3 strategi berikut ini yang sangat penting.

1. Kelompok atraksi, baik yang berupa atraksi alam, budaya maupun karya manusia yang terdiri dari obyek wisata yang pada dasarnya bersifat statis dan bersifat dinamis dan tidak terikat pada tempat
2. Kelompok aksesibilitas yang tercermin alam berbagai fasilitas antara lain angkutan darat laut udara danau sungai juga izin-izin berkunjung, kebijakan visa, izin masuk daerah yang dilindungi seperti suaka alam, suaka margasatwa, suaka budaya, situs sejarah dan lain-lain
3. Kelompok akomodasi yang menawarkan tempat berteduh, tempat tinggal, sarana konferensi dan pameran, sarana ibadah dan sarana hidangan berupa restoran inilah beberapa hal yang tentunya harus diperhatikan pemerintah daerah dalam hal untuk mengembangkan industry Pariwisata yang ada.

Pengertian pendapatan (revenues) berbeda dengan income. revenues merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan income adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatannya itu. income lebih tepat diterjemahkan sebagai penghasilan. Pengertian pendapatan asli daerah menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. menurut waristo pendapatan asli daerah atau yang disebut PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Helina Rahman (2005:38) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam hal ini juga dapat menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sampai saat ini yang termasuk pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapati melalui pajak daerah, BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data yang bersifat deskriptif artinya adalah peneliti mampu menguraikan dengan jelas gambaran yang ada di lapangan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dengan maksud untuk memahami fenomena apa yang dialami, dan dengan cara bagaimana peneliti mampu mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks kasus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang sudah di siapakan (Moleong 2007:6).

Penelitian kali ini berusaha membatasi terhadap hal apa saja yang sesuai dengan rumusan permasalahan yang sudah ada dan tujuan penelitian, maka dari itu yang menjadi focus penelitian kali ini adalah strategi dinas pariwisata kabupaten minahasa utara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan lebih mengfokuskan kepada kepala dinas pariwisata Kabupaten Minahasa Utara.

Adapun informan key dalam buku metode riset kualitatif Dayman dan Holloway menyatakan bahwa Key informan adalah wakil kelompok yang di teliti yang telah berada dalam lingkup tersebut, hingga memiliki pengetahuan, artinya informan key adalah orang yang mampu memberikan informasi kepada peneliti. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian.

1. Informan kunci (key informan) yaitu kepala dinas pariwisata Kabupaten Minahasa Utara.
2. Informan utama adalah 5 orang pegawai dinas pariwisata Kabupaten Minahasa Utara
3. Informan tambahan adalah masyarakat di sekitar objek wisata tempat penelitian 4 orang

Hasil Penelitian

Bedasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui hasil-hasil wawancara yang tentunya diperoleh melalui informan, maka dari pada itu dibagian ini peneliti akan membahas Strategi pengelolaan kepariwisatawan yang seharusnya didukung oleh beberapa hal:

- a. Kebijakan Operasional dalam pengembangan objek dan juga daya tarik wisata. Kebijakan operasional yang dimaksudkan disini adalah mencakup penetapan atas pusat-pusat wilayah pengembangan objek tentu

atas dasar analisis struktur rencana tata ruang dan pengembangan kawasan pariwisata dengan memperhatikan infrastruktur dan suprastruktur, daya dukung lingkungan serta nilai daya tarik obyek wisata unggulan yang dimana dianggap memiliki karakteristik daya tarik yang paling menonjol berdasarkan nilai atraktif yang dimiliki dan didukung fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.

- b. Kebijakan Operasional pengembangan sarana wisata Dalam kebijakan kali ini harus mencakup penetapan keputusan mengenai klasifikasi hotel, penginapan, restoran dan rumah makan atas dasar peraturan perundang-undangan yang tentunya berlaku, penetapan keputusan mengenai pengaturan pembentukan asosiasi hotel/penginapan dan rumah makan sebagai wadah untuk pembinaan dan pengembangan usaha wisata daerah dan penetapan keputusan mengenai pembentukan tim Pembina pengelola dan pengawasan pengembangan sarana usaha wisata daerah.
- c. Kebijakan Operasional pengembangan promosi wisata daerah, hal-hal yang terkait dalam proses kebijakan ini antara lain adalah mencakup penetapan keputusan mengenai pengaturan dalam sutau pembentukan organisasi biro perjalanan wisata dan penetapan keputusan mengenai pengelola media promosi kepariwisatawan daerah, dan penyelenggaraan pengembangan kegiatan atraksi wisata serta pengembangan pembinaan dan pelayanan pemasaran wisata daerah.

Dari berbagai rumusan kebijakan yang ada dalam pengembangan kepariwisatawan yang

telah dikemukakan diatas, maka dari pada itu pedoman penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan yang dilakukan harus terarah dan sasaran pengembangannya juga dijabarkan sebagai berikut: dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah perlu adanya pengarahan yang tujuannya pada peningkatan kualitas perumusan program dan tentu prioritas rencana pengembangan kepariwisataan secara terpadu antara instansi terkait tetapi juga para stakeholder dengan didukung kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas pengembangan penyelenggaraan urusan kepariwisataan yang menjadi tugas daerah.

Adapun hal-hal yang juga perlu diperhatikan adalah pembinaan terhadap masyarakat tentang aset pariwisata daerah yang perlu diarahkan kepada usaha usaha untuk lebih untuk memperkenalkan kekayaan budaya tentu dengan tetap di tunjang sebagai suatu usaha dalam proses pengembangan atas obyek dan daya tarik wisata dengan jalan yang paling baik adalah menyediakan sarana dan prasarana yang tentu harusnya memadai pada setiap titik-titik kawasan obyek wisata yang sudah di tentukan. untuk itu pengembangan obyek wisata andalan dengan harus didukung peningkatan mutu dan kualitas atas kondisi sarana dan prasarana yang ada serta diikuti langsung upaya pelestarian lingkungan hidup, dengan begitu setiap objek wisata yang ada akan bertahan lama bahkan bisa memelihara kebudayaan yang ada. pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangkai peningkatan atas sumber penerimaan daerah tentu perlu diadakan dan diarahkan pada penyempurnaan dan peningkatan unsur bina usaha, pemasaran produk wisata serta penetapan peraturan daerah dalam

hal mengenai izin usaha dalam pengelolaan pada suatu kawasan wisata, ini merupakan strategi yang baik dalam mengembangkan pariwisata yang bermuarah pada penerimaan daerah yang baik.

Titik berat di bidang promosi wisata ialah, yang dilakukan harusnya melalui peningkatan mutu informasi tentu dengan kemasan yang menarik, bimbingan dan pemasaran objek wisata budaya, objek wisata alam maupun objek wisata minat khusus. untuk mencapai peningkatan kualitas dan mutu yang dimaksud maka pada titik berat pengembangan bidang promosi wisata ini perlu adanya dukungan dengan pola kerjasama terpadu antara pihak pemerintah daerah dan juga dinas pariwisata maupun swasta dan juga para satuan organisasi pengendalian dan pelestarian budaya dan lingkungan.

Tentu bagi Kabupaten Minahasa Utara industri pariwisata merupakan suatu peluang komoditi prospektif karna juga didukung dengan kawasan ekonomi khusus yang tentu mempunyai peran penting dalam pembangunan kepariwisataan nasional, sehingga tidak mengherankan apabila pemerintah pusat menaruh perhatian khusus bagi kepariwisataan yang ada di kabupaten minahasa utara. hal ini tentunya di perkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar naik mitu alamnya maupun kebudayaan yang sudah di akui dunia, yang tentu bisa dijadikan modal bagi pengembangan industri pariwisatanya. Karna itu salah satu tujuan pengembangan kepariwisataan di kabupaten minahasa utara adalah untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah yang tentunya di tujukan bagi masyarakat pada umumnya. maka dari itu perluasan

kesempatan serta lapangan pekerjaan di bidang kepariwisatawan dan mendorong kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri lainnya.

Pada saat ini merupakan momentum yang tepat dimana bagi setiap daerah yang ingin terlihat lebih mandiri dalam menggali dan tentu mengembangka setiap potensi-potensi yang dimiliki.maka dari itu kemandiriandaerah ini terwujud dalam pemberiaan kewenangan yang cukup besar tentu meliputi kewenagangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negri itu artinya adalah setiap daerah berhak memandirikan dirinya sendiri dalam hal ini kepariwisatawan daerah.

Penyerahan kewenangan tersebut tentu harus disertai juga dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sekali lagi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia harus sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. ini merupakan konsekuensi logis bagi daerah tentu dengan adanya penerapan otonomi daerah maka segala oprasional dilimpahkan kepada daerah.

Sehubungan dengan adanya penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang menyangkut pengembangan industri pariwisata harus meliputi pembiayaan, perizinan, perencanaan yang matang,pelaksanaan dan juga adalah evaluasi menjadi wewenan dalam menyelenggarakannya, maka dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk harus lebih mawdiri dalam mengelolanya dan dalam mengembangkannya objek dan potensi wisata yang ada di daerah mereka serta bagaimana cara pembiayaan promosinya.

Kita juga harus tau bawah penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berasal berasal dari

pendapatan asli daerah berupa,dana perimbangan dan juga pinjaman daerah dan penerimaan lain lain yang sah.untuk itu sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang di gali atau didapat melalui atau dalam wilaya daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajakdaerah,hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jika dilihat dari pendapatan asli daerah kita pun bisa melihat ada beberapa daerah di Indonesia yang masih miskin akan sumber daya alam mereka sehinga tidak dapat mengandalkan pendapatan asli mereka tentu dari hasil sumber daya alam mereka.oleh karena itu pengembangan indutri pariwisata suatu daerah menjadi alas an utama sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tentu melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah setempat.kita tau bersama pada tahun 1997 industri pariwisata Indonesia diperkirakan bisa menghasilkan pajak tidak langsung sejumlah 8,7 dari keseluruhan nilai pajak tidak langsung dan pada tahun 2007 meningkat sebesar 9.6 dari total keseluruhan.dari data tersebut bisa menunjukkan bahwa industri pariwisata Indonesia mampu memberikan kontribusi yang cukup besar di bidang perpajak.karna itu tentu diharapkan daerah bisa mengambil kesempatan dengan lebih mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah karna hal itu bisa memberikan dampak bagi keuangan daerah.

Sektor pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan daerah tersebut maka dari iti daerah harus mampu mengembang daerah sesuai dengan otonomi daerah.pajak merupakan sumber penerimaan yang besar bagi Negara yang tentu penggunaanya untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran rutin bagi Negara, juga untuk dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu kontribusi pajak bagi pembangunan diharapkan tidak saja mendorong pembangunan satu wilayah saja, akan tetapi juga dapat mendorong pembangunan secara merata sampai daerah terpencil.

Dalam hal ini bagi ruang lingkup daerah, kontribusi industri pariwisata di bidang perpajakan tentu sangat diharapkan mampu dan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Tetapi kita tau juga bukan mengharapkan wisata itu langsung jadi, perlu adanya usaha dari pemerintah dalam mengembangkannya, hal yang di khawatirkan juga adalah harusnya penguatan pajak tersebut harus dilakukan secara bijak. Artinya penguatan pajak harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keserhanaan dalam menuju kemandirian daerah, potensi industri pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, karena tentu dari pihak swasta akan memberikan kepercayaan yang penuh bagi pemerintah, dalam hal ini kontribusi pajak dan industri pariwisata daerah selain sebagai sumber pendapatan asli daerah, juga dimaksudkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Pada dasarnya pengembangannya suatu industri, dalam hal ini industri pariwisata di suatu daerah pasti akan berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian yang ada di daerah tersebut. Karena itu pasti akan ada dampak positif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada

dalam jangkauan industri pariwisata tersebut karena tentunya ada perluasan lapangan pekerjaan secara regional di lokasi pariwisata, tentu hal ini diakibatkan dari industri pariwisata yang dikembangkan dengan baik di lokasi tersebut. Misalnya dibangun sebuah sarana prasarana di daerah tersebut seperti rumah makan maka masyarakat sekitar bisa masuk dalam pekerjaan tersebut, maka secara tidak langsung akan tersedot juga dalam proyek-proyek seperti misalnya dalam upaya membangkitkan tenaga listrik, jembatan penghubung, perhotelan penginapan, rumah makan dan lain-lain.

Kesimpulan

- 1) Kebijakan pemerintah Daerah dalam sebuah prioritas kemajuan tapi juga pengelolaan kepariwisatawan haruslah melalui dukungan alokasi yang cukup besar haruslah di ikuti oleh infrastruktur yang baik tapi sampai saat ini belum terlihat pula infrastruktur yang ada berupa jalan menuju lokasi wisata.
- 2) Dalam usaha untuk memajukan pariwisata maka promosi wisata adalah salah satu alternatifnya tetapi dalam kenyataannya promosi kepariwisatawan yang dilakukan dinas pariwisata belum berjalan dengan efektif, karena hanya melalui sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet ataupun yang lainnya yang hal demikian belum tentu menjangkau para wisatawan mancanegara maka dari pada itu diharapkan website yang dikelola dinas pariwisata harus tersedia promosi juga tentu untuk menyentuh para wisatawan yang ada dari mancanegara.
- 3) Respond dan partisipasi dari masyarakat tentu sangat penting tentu dalam upaya untuk mendukung

pengembangan pariwisata yang ada, untuk itu diharapkan dari pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata untuk lebih menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata

Saran

- 1) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini seharusnya memperhatikan infrastruktur yang ada di ingat cukup besarnya alokasi untuk yang diberikan untuk mengelola pariwisata yang ada dalam hal ini juga sudah ditetapkan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus
- 2) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini Disan Pariwisata harusnya perlu lebih lagi meningkatkan promosi kepariwisatawan tentu bagi wisatawan mancanegara, jika promosi berjalan dengan baik maka banyak wisatawan yang akan datang dan akan memberikan dampak bagi pendapatan yang ada didaerah.
- 3) Perlu lagi di tingkatkan kinerja pemerintah dalam hal merespon dan menyabut niat baik dan positif dari pada masyarakat dalam mendukung perkembangan kepariwisatawa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Gerry & Kevan Scholes. 2002. Exploring Corporate Strategy. Rineka Cipta. Jakarta
- PB, Triton. 2007. Manajemen Strategis, Terapan Perusahaan dan Bisnis. Tugu Jakarta
- Hunger David dan Thomas L. 2003. Manajemen Strategis & Dasar-Dasar Strategi, Pustaka Pelajar.
- Purnomo. 2005. Manajemen Strategis. Jurnal Tentang Manajemen, Angkasa Purnama.
- Pardede. 2006. Manfaat Strategi. Gramedia Digital Indonesia
- Dirgantoro, Crown, 2004. Manajemen Strategik Konsep, kasus dan Implementasi. Gramedia. Jakarta.
- Henry Minzberg. 2005. Bisnis dan Manajemen & Dasar-Dasar Manajemen, Graha Purnama Jakarta.
- Pendit Nyoman S. 2006. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar. Pradnya Paramita Jakarta.
- Helina Rahman. 2005. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Arifgosita. Mardiasmo Perpajakan Yogyakarta
- Lundberg, D.E, M.H. Stavenga. M. Krishnamoorthy. 2006. Ekonomi Pariwisata. PT. Gramedia Puataka Utama. Jakarta.
- Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, offset, Bandung.
- Andai Prastowo. 2010. Menguasai Teknik Koleksi Data Penelitian. Jogjakarta. Diva Pres.
- Catherine Marshall dan Gretchen. 2006. Merancang Penelitian Kualitatif. Ribuan oaks Publication.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung.